

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Politik & Keamanan**

*Vol. 01, Ed. 22, Desember 2021*

**Mencermati Anggaran Belanja  
Bakamla RI**

**Hal. 1**

**Tinjauan Konflik Agraria di Tahun  
2020**

**Hal. 3**

**Mitigasi Keamanan Menjelang  
Pemilu 2024**

**Hal. 5**



## Daftar Isi

<b>Mencermati Anggaran Belanja Bakamla RI .....</b>	<b>1</b>
<b>Tinjauan Konflik Agraria di Tahun 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>Mitigasi Keamanan Menjelang Pemilu 2024 .....</b>	<b>5</b>

## Dewan Redaksi

### Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

### Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

### Redaktur

Ratna Christianingrum \* Ade Nurul Aida

Tio Riyono \* Riza Aditya Syafri

### Editor

Satrio Arga Effendi

### Sekretariat

Husnul Latifah \* Musbiyatun

Memed Sobari \* Hilda Piska Randini

*Budget Issue Brief* Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

## Komisi I

## POLITIK DAN KEAMANAN

## Mencermati Anggaran Belanja Bakamla RI

## HIGHLIGHT

- Badan Keamanan Laut RI merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian yang bertugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- Anggaran belanja Bakamla menunjukkan penurunan yang sangat tajam pada 2022. Rata-rata anggaran belanja Bakamla tumbuh minus 10,08 persen per tahun.
- Anggaran belanja Bakamla justru didominasi oleh belanja modal dan Barang yang mencapai 90 persen dari total belanja selama periode 2017-2022.
- Anggaran belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut relatif masih rendah (hanya 35 persen). dibandingkan dengan belanja dukungan manajemen (65 persen).
- Target *output* prioritas menurun tajam hanya menyisakan 20 dan 15 output saja masing-masing pada 2021 dan 2022 seiring dengan menurunnya alokasi anggaran Bakamla.

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian yang berdiri pada 8 Desember 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Bakamla memiliki tupoksi melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bakamla menyelenggarakan enam fungsi yaitu: menyusun kebijakan nasional, menyelenggarakan sistem peringatan dini, melaksanakan penindakan hukum, menyinergikan patroli instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan dalam rangka operasi keamanan laut.

Bakamla bukan satu-satunya instansi negara yang diberi tugas penegakan hukum dan keamanan di laut. Terdapat beberapa instansi lain seperti Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, POLRI dan TNI AL. Meskipun demikian, peran Bakamla cukup strategis karena diberi tugas dan kewenangan menjaga keamanan laut Indonesia mulai dari zona perairan teritorial di bawah 12 *nautical mile* hingga zona landas kontinen dan perairan internasional sejauh 350 *nautical mile* sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan tugas yang sangat besar tersebut, alokasi anggaran belanja Bakamla justru sangat terbatas (tidak pernah mencapai lebih dari Rp800 miliar) sejak 2017. Padahal ancaman di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sangat kompleks seperti: sengketa perbatasan dan Laut Natuna Utara, perompakan (*armed and robbery*) dan pembajakan (*piracy*), *Trans National Organized Crimes* (TNOC) berupa penyelundupan narkoba, BBM dan senjata, *illegal entry* dan aksi terorisme (Renstra Bakamla 2020-2024).

## Anggaran Belanja Turun Tajam

Perkembangan anggaran belanja Bakamla sejak 2017 menunjukkan tren penurunan hingga pada 2022. Rata-rata anggaran belanja Bakamla tumbuh minus 10,08 persen per tahun atau anjlok dari Rp720,6 miliar pada 2017 menjadi hanya Rp423 miliar pada 2022. Anggaran belanja pada 2022 justru melewati titik terendah pada 2019 (Gambar 1). Penurunan anggaran belanja Bakamla secara tidak langsung akan berdampak pada tugas-tugas teknis dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia yang luasnya mencapai tiga juta kilometer persegi.

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI  
Sekretariat Jenderal DPR RI

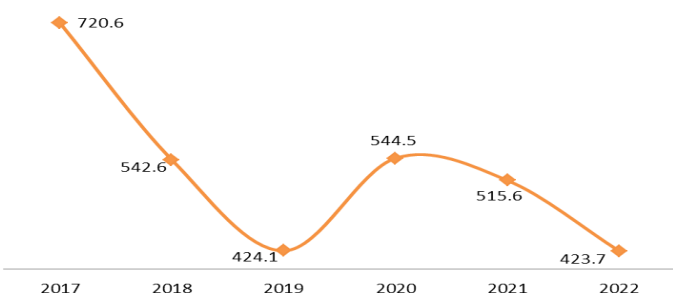
## Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna  
Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio  
Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya  
Syafri

Penulis: Mujiburrahman · Satrio Arga  
Effendi

**Gambar 1.** Perkembangan Anggaran Belanja Bakamla RI Periode 2017-2022 (Miliar Rupiah)

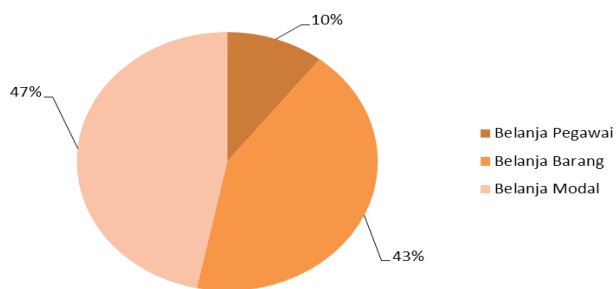


Sumber: LKPP Tahun 2017-2020 dan Nota Keuangan APBN 2022, diolah

**Hampir 90 Persen Anggaran Belanja Untuk Belanja Barang dan Modal**

Tidak seperti anggaran di beberapa Kementerian dan Lembaga lainnya, anggaran belanja Bakamla justru didominasi oleh belanja modal dan barang yang mencapai 90 persen dari total belanja Bakamla selama periode 2017-2022. Rata-rata belanja modal mencapai Rp247 miliar (46,74 persen), lebih besar dibandingkan belanja barang sebesar Rp225,9 miliar (42,74 persen) dan belanja pegawai yang hanya Rp55,6 miliar (10,52 persen).

**Gambar 1.** Rata-Rata Anggaran Per Jenis Belanja Selama 2017-2022 (Persen)



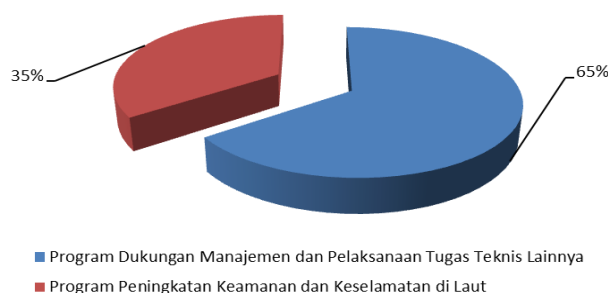
Sumber: LKPP Tahun 2017-2020 dan RKA KL 2021 dan 2022 diolah

**Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut Relatif Masih Rendah**

Program peningkatan keamanan laut bertujuan untuk mewujudkan eskalasi keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem informasi keamanan laut Indonesia. Sedangkan program dukungan manajemen hanya sebatas mengelola administrasi umum dan layanan perkantoran.

Berdasarkan belanja program, justru belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut relatif masih lebih rendah (hanya 35 persen) atau rata-rata Rp199,9 miliar selama 2017-2022. dibandingkan dengan belanja dukungan manajemen (65 persen) atau rata-rata Rp374,6 miliar (gambar 3).

**Gambar 2.** Rata-Rata Anggaran Belanja Per Program Periode 2017-2022 (Persen)



Sumber: LKPP Tahun 2017-2020, RKA KL 2021 dan 2022

**Target Output Prioritas Menurun Tajam Pada 2021 dan 2022**

Seiring dengan penurunan anggaran belanja pada 2021 dan 2022, target *output* prioritas juga menurun tajam hanya menyisakan 20 dan 15 *output* saja. Jumlah tersebut sangat jauh bila dibandingkan pada 2020 yang mencapai 906 *output*. *Output* prioritas berupa operasi laut bersama dalam negeri turun menjadi 10 sedangkan operasi udara bersama dalam negeri tidak lagi menjadi target pada 2021 dan 2022. Target belanja pada 2021 dan 2022 fokus pada pengadaan *Unmanned Aerial Vehicle* sebanyak 2 *output* dan senjata dan amunisi patroli kamlamla masing-masing 1 dan 2 *output*.

**Tabel 1.** Realisasi dan Target Output Prioritas Bakamla RI Periode 2017-2022

No	Kegiatan/Output Prioritas	Realisasi				Target	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri	25	31	196	177	10	10
2	Operasi Laut Bersama Luar Negeri	4	4	4		4	
3	Operasi Udara Bersama Dalam Negeri			306	396		
4	Operasi Udara Bersama Luar Negeri			4		4	
5	Pengadaan Kapal Patroli (Unit)	2	3	3			
6	Pengadaan Alat Navigasi dan Keselamatan Kapal		2				
7	Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Kamlamla				332		2
8	Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Kamlamla				1		1
9	Pengadaan UAV					2	2
Total		31	40	513	906	20	15

Sumber: Nota Keuangan APBN 2022, diolah



## Komisi II

## POLITIK DAN KEAMANAN

## Tinjauan Konflik Agraria di Tahun 2020

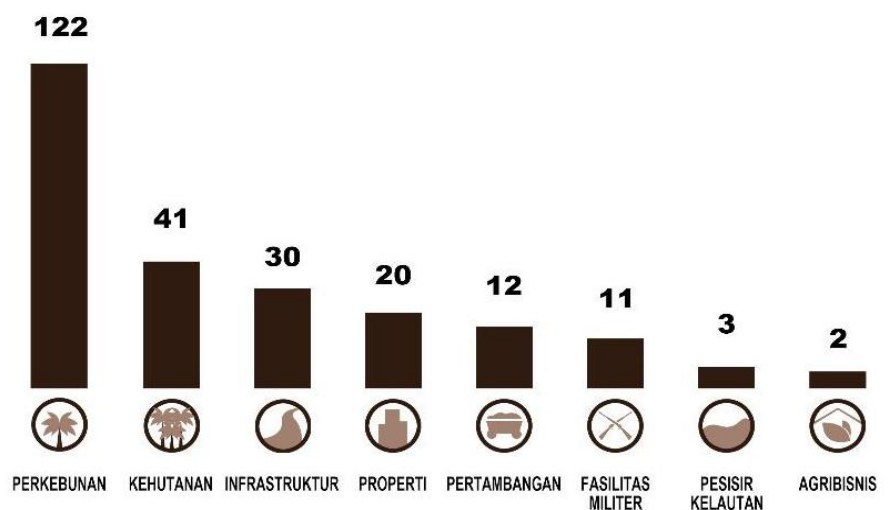
## HIGHLIGHT

- Pemerintah Melalui Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan berbagai program baik represif maupun preventif untuk menyelesaikan permasalahan konflik Agraria.
- Namun, sepanjang 2020 masih terjadi 241 kasus sengketa tanah.
- Sepanjang tahun 2020 terjadi 17 kasus sengketa tanah yang berkaitan dengan PSN.
- Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghadapi beberapa persoalan yaitu proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terdampak.
- Pemerintah dinilai perlu untuk mendorong percepatan kegiatan-kegiatan dalam Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang.

Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan keadilan pertanahan bagi seluruh rakyat Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mencanangkan beberapa program untuk mengatasi konflik agraria di Indonesia. Kementerian ATR/BPN telah melakukan koordinasi lintas sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang terdiri dari pejabat kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga *Civil Society Organization (CSO)* dan *Non-Governmental Organization (NGO)*. Hal ini bertujuan untuk berkoordinasi, mengumpulkan data informasi, bernegosiasi, serta mediasi sehingga aspirasi dan tantangan dari berbagai pihak dapat terserap untuk menemukan rekomendasi kebijakan yang solutif, sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, salah satu pencegahan sengketa dan konflik pertanahan dilakukan melalui penertiban administrasi di tingkat desa maupun kecamatan yang juga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang erat, mulai dari aspek tertib administrasi hingga adanya indikasi konflik dan sengketa.

Namun, dalam pelaksanaannya meskipun telah dilakukan langkah-langkah preventif dan represif oleh Pemerintah, sepanjang tahun 2020 tercatat masih terjadi 241 kasus sengketa pertanahan yang mencakup lebih dari 600 ribu hektar tanah dan melibatkan lebih dari 135 ribu kepala keluarga di seluruh Indonesia. Konflik terbesar terjadi pada sektor perkebunan yang mencapai 122 kasus dan disusul oleh konflik di sektor kehutanan sebesar 41 kasus.

**Gambar 1.** Frekuensi Konflik Agraria Berdasarkan Sektor Tahun 2020



Sumber: *Konsorsium Pembaruan Agraria, 2021*

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jendral DPR RI

## Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

**Redaktur:** Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** · Nova Aulia Bella · Rendy Alvaro

## Konflik Agraria Berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional

Sepanjang tahun 2020, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 30 letusan konflik di sektor pembangunan infrastruktur. Dari angka tersebut, 17 diantaranya disebabkan oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk di dalamnya pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mulai dari pembangunan bandara, jalan tol, bendungan, objek pariwisata beserta infrastruktur penunjangnya. Beberapa kasus yang terkait PSN, termasuk KSPN di dalamnya merupakan kasus lama yang terjadi kembali pada tahun ini. Selebihnya kasus baru akibat proses-proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya letusan konflik akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang Padang-Pekanbaru. Selanjutnya beberapa letusan konflik infrastruktur lama yang kembali berkejolak pada tahun ini diantaranya, pembangunan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang tidak kunjung tuntas proses ganti kerugiannya. Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghadapi beberapa persoalan yaitu proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terdampak.

## Anggaran dan Realisasi Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang

Berdasarkan laporan keuangan Kementerian ATR/BPN, dapat diketahui bahwa realisasi Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang hanya mencapai 82,18% di tahun 2020. Capaian tersebut termasuk dalam tiga program dengan realisasi terendah di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2020. Meskipun realisasi anggaran bukan merupakan satu-satunya indikator pengukuran kinerja suatu program, namun hal ini perlu menjadi perhatian karena realisasi anggaran mencerminkan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

**Tabel 1.** Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program di Kementerian ATR/BPN Tahun 2020

Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	19.606.400.000	18.793.510.117	95,85
Program Penataan Agraria	20.948.607.000	19.961.711.236	95,29
Program Pengadaan Tanah	13.229.627.000	12.542.774.424	94,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165.472.618.000	156.705.243.176	94,70
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	232.595.929.000	213.412.761.553	91,75
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.528.076.469.000	3.976.795.967.309	87,83
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	21.703.735.000	18.499.579.057	85,24
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	130.471.857.000	111.200.384.889	85,23
Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	16.450.702.000	13.519.093.176	82,18
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	2.920.085.910.000	2.236.593.389.811	76,59
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	201.018.732.000	147.631.717.296	73,44

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN tahun 2020 (audited), 2021

Masih tingginya angka konflik agraria sepanjang tahun 2020 dan jika konflik tersebut terjadi secara berkepanjangan dikhawatirkan di masa mendatang akan menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang lebih tinggi di masyarakat. Untuk itu Pemerintah dinilai perlu untuk melakukan melakukan proses penataan ulang struktur penguasaan tanah dan meredistribusikannya. Selain itu, Pemerintah juga perlu untuk mendorong percepatan kegiatan-kegiatan dalam program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN agar berbagai sengketa pertanahan dapat segera teratasi.

## Komisi III

## POLITIK DAN KEAMANAN

## Mitigasi Keamanan Menjelang Pemilu 2024

## HIGHLIGHT

- Pemilu 2024 diwacanakan akan dilaksanakan pada 21 Februari 2024 Pilpres dan Pileg serta 27 November 2024 untuk Pilkada.
- Diperlukan mitigasi gangguan keamanan menjelang pemilu 2024.
- Penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu selama proses Pemilu, terutama untuk menyerang kandidat, mengalami peningkatan sejak Pilpres tahun 2014.
- Media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran isu negatif.
- Apabila dilihat anggaran pengamanan POLRI untuk Pemilu 2019, di dalamnya belum terlihat anggaran pelaksanaan patroli siber.
- Pada masa pra-pemilu potensi gangguan keamanan mungkin terjadi pada saat proses penyusunan daftar pemilih dan pencalonan.
- Guna meminimalisir gangguan keamanan yang terjadi pada Pemilu 2024 maka POLRI perlu terus meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan penegakan hukum.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diwacanakan akan dilaksanakan pada 21 Februari 2024 untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serta 27 November 2024 untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam kesempatan "Apel Gelar Pasukan TNI-Polri", Wiranto mengatakan bahwa keamanan merupakan kunci kesuksesan dari penyelenggaraan pemilu. Berkaca dari pelaksanaan Pemilu di tahun 2019, terdapat banyak gangguan keamanan. Meskipun gangguan keamanan yang terjadi dapat diatasi oleh aparat penegak hukum, namun dampak dari gangguan keamanan tersebut cukup besar. Bahkan polarisasi dalam masyarakat masih dapat dirasakan hingga saat ini.

Guna memastikan pemilu pada Tahun 2024 berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan mitigasi gangguan keamanan yang akan terjadi. Hal ini bertujuan agar gangguan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Pada akhirnya Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.

**Belajar dari Pemilu 2019**

Penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu (*hoax*) selama proses Pemilu, terutama untuk menyerang kandidat, mengalami peningkatan sejak Pilpres tahun 2014. Namun dalam Pilpres 2019, target serangan tidak hanya kepada kandidat, namun juga kepada penyelenggara pemilu. Narasi yang konsisten dibangun untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu yaitu isu negatif terjadi jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara untuk mendorong opini publik. Namun disaat yang bersamaan hal ini menyebabkan rusaknya kehidupan demokrasi di Indonesia.

Media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran isu negatif. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan potensi penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran berita akan semakin meningkat menjelang pemilu 2024. Melihat dampak penyebaran isu negatif, yang mengancam disintegrasi bangsa, maka perlu upaya mencegah penyebarannya. Kontrol media sosial perlu ditingkatkan guna mencegah tersebarnya isu negatif yang mengarah kepada *hoax*. Untuk itu POLRI perlu meningkatkan patroli siber.

Apabila dilihat anggaran pengamanan POLRI untuk Pemilu 2019, di dalamnya belum terlihat anggaran pelaksanaan patroli siber. Apabila dilihat anggaran dari Dittipidum POLRI, dengan asumsi bahwa patroli siber dilaksanakan oleh Divisi *Cybercrime* dibawah Reskrim, maka besaran anggarannya masih relatif kecil.

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

**Penanggung Jawab :**

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

**Redaktur:** Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** Azizah Ulfa · Tio Riyono · Ratna Christianingrum

Sehingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, perlu dilakukan pengalokasian anggaran guna mendukung pelaksanaan patroli siber.

**Gambar 1.** Dukungan Anggaran Pengamanan Pemilu 2019 (dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA	ANGGARAN
1	SOPS POLRI	23.989.302.000
2	ITWASUM POLRI	1.180.374.000
3	BAINTEKAM POLRI	4.684.582.800
4	DITBINMAS KORSABHARA BAHARKAM POLRI	199.771.000
5	DITSAMAPTA KORSABHARA BAHARKAM POLRI	589.946.500
6	DITPOLSATWA KORSABHARA BAHARKAM POLRI	301.015.000
7	DITPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI	22.695.293.000
8	DIVHUBINTER POLRI	8.751.155.800
9	KORLANTAS POLRI	1.465.035.000
10	KORBRIMOB POLRI	18.386.100.000
11	DITTIPIIDUM BARESKRIM POLRI	2.763.513.000
12	DENSUS 88 AT	301.015.000
13	SLOG POLRI	216.216.000
14	DITPOLUDARA KORPOLAIRUD	3.497.352.000
15	DITPOLAIR KORPOLAIRUD	12.383.648.600
16	DIVHUMAS POLRI	500.896.450
17	DIV PROPAM	1.959.153.000
18	DIV TIK POLRI	490.132.500
19	PUSDOKKES POLRI	910.161.350
20	POLDA	2.198.635.286.000
21	JUMLAH	2.303.899.949.000

Sumber: Polri, 2021

### Mitigasi Gangguan Keamanan pada Tahapan Pemilu

Masa Pemilu terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu Masa Pra-Pemilu, Masa Pemilu, dan Masa Pasca Pemilu. Pada masa pra-pemilu potensi gangguan keamanan mungkin terjadi pada saat proses penyusunan daftar pemilih dan pencalonan. Adapun potensi masalah yang mungkin terjadi ialah adanya pemilih yang belum memiliki e-KTP, adanya pemilih ganda, dan pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan. Permasalahan tersebut dapat dijadikan alasan bagi calon yang kalah untuk melakukan aksi unjuk rasa dan gugatan hukum. Sedangkan pada tahapan pencalonan potensi masalahnya ialah manipulasi data pendukung oleh bakal calon perseorangan, dukungan ganda oleh pendukung serta pemalsuan dokumen dan/ atau syarat calon. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sengketa pencalonan di PTUN dan adanya calon yang tidak lolos melakukan tekanan serta gugatan hukum kepada KPU. Selain itu pada tahapan kampanye, potensi masalah yang mungkin ada ialah adanya kampanye hitam, penyebaran berita *hoax*, politik uang, intimidasi dan kampanye SARA. Hal ini dapat memicu konflik antar pendukung pasangan calon.

Sedangkan pada Masa Pemilu, potensi permasalahan yang muncul antara lain politik uang, intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara, manipulasi perhitungan suara, pemalsuan dan/atau penyalahgunaan model C6 serta pemungutan suara ulang. Hal ini dapat memicu konflik antar pendukung calon. Terlebih lagi jika adanya *hoax* dan informasi kecurangan yang beredar di masyarakat.

Pada masa pasca pemilu, potensi masalah yang mungkin terjadi ialah adanya perbedaan data antara saksi dan KPU, potensi manipulasi data hasil pemilu dan potensi politik uang. Hal ini dapat menyebabkan adanya peningkatan demonstrasi dari calon yang kalah serta peningkatan potensi konflik antar calon.

### Upaya POLRI

Guna meminimalisir gangguan keamanan yang terjadi pada Pemilu 2024 maka POLRI melakukan upaya pre-emptif, preventif dan penegakan hukum. Upaya pre-emptif antara lain deteksi dan pencegahan dini, pemetaan kerawanan, penggalangan terhadap komponen masyarakat, penggalakan sistem keamanan lingkungan dan penggunaan strategi polmas. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan antara lain kerja sama, koordinasi dan sinergi dengan seluruh *stakeholder*, pengamanan secara berkesinambungan terhadap sumber konflik, gelar operasi cipta kondisi, menjaga dan mengurangi perbedaan pendapat antar peserta Pilkada dan berusaha untuk mengarahkan pada persepsi yang sama, serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para peserta Pilkada. Dalam kaitannya dengan pengamanan dan persiapan pemilu 2024, POLRI perlu terus menegakkan hukum dan menindak tegas pelaku provokasi, melakukan identifikasi pimpinan/ kelompok/ provokator dan pihak ketiga yang memanfaatkan adanya konflik yang terjadi, serta penegakan hukum secara tuntas, tegas, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum.